

**PENERAPAN PENCATATAN AKUNTANSI DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA UMKM ANNISA 36, SEMARANG****Revy Amyneva Gulnoria¹, Khansa Shabihah², Rozihan³**^{1,2,3}Universitas Islam Sultan Agung
E-Mail: revygulnoria@unissula.ac.id

Published: Agustus 2026

ABSTRACT

This community service programme aimed to strengthen MSME financial accountability through simple accounting record-keeping assistance at Annisa 36 MSME in Semarang. The programme followed previous training on Electronic Data Capture (EDC), which had focused on non-cash transaction literacy. The assistance covered the separation of personal and business cash, the use of a cash book, routine transaction recording, and the documentation of digital transactions. The programme comprised an assessment of existing recording practices, material delivery, guided practice, and monitoring conducted one to two weeks after the activity. Data were analysed descriptively using four implementation indicators involving 36 participants. The monitoring results showed that all participants had separated personal and business cash. Twenty-eight participants (77.8%) used a cash book, while 26 participants (72.2%) routinely recorded transactions and documented digital transactions. These findings indicate that basic accounting practices had begun to be implemented, although recording consistency still required reinforcement. Follow-up assistance should focus on preparing simple income statements and periodically evaluating record-keeping practices.

Keywords: *accounting record-keeping; financial accountability; MSMEs***PENDAHULUAN**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mempertahankan aktivitas ekonomi lokal, menciptakan kesempatan kerja, dan menopang pendapatan rumah tangga. Keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan penjualan, tetapi juga oleh ketertiban pengelolaan keuangan yang memungkinkan pelaku usaha menilai kinerja dan posisi kas secara wajar. Pencatatan yang tidak sistematis menyebabkan arus masuk dan arus keluar kas sulit ditelusuri, laba usaha tidak dapat diestimasi secara memadai, serta pengeluaran usaha berpotensi tercampur dengan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat melemahkan proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas keuangan karena penggunaan sumber daya usaha tidak didukung oleh informasi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pencatatan dan pengendalian internal merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan UMKM (Aadilah et al., 2025; DiBella et al., 2023).

Perkembangan sistem pembayaran digital memberikan peluang bagi UMKM untuk melaksanakan transaksi secara lebih cepat, aman, dan terdokumentasi. Mesin Electronic Data Capture (EDC), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan layanan perbankan digital menghasilkan bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan usaha. Namun, ketersediaan bukti digital tidak secara otomatis menghasilkan informasi keuangan yang tertib apabila transaksi tersebut tidak dipindahkan ke buku kas atau catatan usaha. Berbagai penelitian dan kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa teknologi keuangan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan daya saing UMKM, tetapi efektivitas penerapannya tetap dipengaruhi oleh literasi keuangan serta pendampingan yang sesuai dengan kapasitas mitra (Basar et al., 2024; Damayanti et al., 2023; Retnowati et al., 2022; Zuliyati et al., 2021). Dengan demikian, digitalisasi pembayaran perlu diikuti oleh kebiasaan pencatatan agar jejak transaksi dapat dimanfaatkan dalam proses pertanggungjawaban keuangan.

UMKM Annisa 36 sebelumnya telah mengikuti pelatihan dan pendampingan penggunaan metode pembayaran digital EDC. Program tersebut berfokus pada peningkatan literasi transaksi nontunai, pengoperasian perangkat, dan kesiapan mitra dalam menerima pembayaran digital (Shabihah et al., 2026). Hasil kegiatan awal menunjukkan bahwa mitra mulai memahami manfaat pembayaran digital, tetapi pencatatan transaksi tunai dan nontunai masih perlu diperkuat agar setiap penerimaan dan pengeluaran dapat ditelusuri secara jelas. Permasalahan paling mendasar yang teridentifikasi ialah pencampuran kas pribadi dan kas usaha, sehingga pemilik usaha mengalami kesulitan dalam menentukan saldo usaha dan menjelaskan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Atas dasar kondisi tersebut, pemisahan kas, penggunaan buku kas, pencatatan rutin, dan pencatatan transaksi digital ditetapkan sebagai fokus kegiatan lanjutan. Kegiatan ini tidak mengulang pelatihan penggunaan EDC, tetapi mengembangkan pemanfaatan informasi transaksi digital ke dalam praktik pencatatan akuntansi sederhana. Pendampingan diarahkan pada

empat perilaku yang dapat diamati, yaitu penggunaan buku kas, pemisahan kas pribadi dan kas usaha, pencatatan transaksi secara rutin, serta pencatatan transaksi digital. Perbedaan fokus tersebut menempatkan kegiatan ini sebagai tahap lanjutan dari literasi pembayaran menuju pengelolaan informasi keuangan. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan dan menganalisis tingkat penerapan keempat indikator berdasarkan monitoring satu hingga dua minggu setelah kegiatan. Hasil kegiatan diharapkan memberikan gambaran mengenai praktik yang telah diterapkan dan aspek yang masih memerlukan pendampingan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada UMKM Annisa 36 di Semarang sebagai program lanjutan setelah pelatihan pembayaran digital EDC dan melibatkan 36 peserta yang selanjutnya diidentifikasi menggunakan kode P01 sampai P36 pada lembar monitoring. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pelatihan dan pendampingan partisipatif agar peserta tidak hanya memperoleh penjelasan konseptual, tetapi juga mempraktikkan pencatatan berdasarkan transaksi usaha. Materi disusun secara sederhana dan difokuskan pada kebiasaan yang dapat segera diterapkan dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas lima tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama berupa identifikasi kondisi awal untuk memetakan kebiasaan peserta dalam mencatat transaksi dan memisahkan dana usaha. Tahap kedua adalah penyusunan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis mitra. Tahap ketiga mencakup penyampaian materi mengenai pencatatan akuntansi sederhana, sedangkan tahap keempat berupa praktik pengisian buku kas dan pengelompokan transaksi tunai maupun digital. Tahap kelima adalah monitoring pascakegiatan untuk menilai penerapan kebiasaan yang telah dilatihkan. Rangkaian pelaksanaan kegiatan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

Kegiatan	Fokus	Luaran
Identifikasi kondisi awal	Kebiasaan pencatatan dan pemisahan kas	Pemetaan kebutuhan mitra
Penyusunan materi	Buku kas, pemisahan kas, serta transaksi rutin dan digital	Materi pelatihan sederhana
Pelatihan	Pemahaman dasar pencatatan akuntansi	Pemahaman konsep dan contoh pencatatan
Praktik dan pendampingan	Pengisian buku kas berdasarkan transaksi usaha	Hasil latihan pencatatan peserta
Monitoring pascakegiatan (1–2 minggu)	Empat indikator penerapan	Data penerapan pascakegiatan

Instrumen monitoring terdiri atas empat pertanyaan tertutup dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Indikator yang dinilai meliputi penggunaan buku kas, pemisahan kas pribadi dan kas usaha, pencatatan transaksi secara rutin, serta pencatatan transaksi digital. Monitoring dilaksanakan satu hingga dua minggu setelah pendampingan agar data merepresentasikan penerapan awal, bukan hanya pemahaman peserta pada saat pelatihan. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase dari 36 peserta. Kategori status agregat pada lembar kerja tidak digunakan dalam analisis. Karena kegiatan ini tidak dilengkapi pengukuran awal pada tahap pra-kegiatan, hasil tidak diinterpretasikan sebagai peningkatan atau perubahan kausal, melainkan sebagai tingkat penerapan yang teramati setelah pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan Pencatatan Akuntansi

Pendampingan diawali dengan penjelasan mengenai fungsi pencatatan sebagai sarana pengendalian kas dan penyediaan informasi untuk mengevaluasi kegiatan usaha. Peserta diperkenalkan pada format buku kas sederhana yang memuat tanggal, keterangan transaksi, kas masuk, kas keluar, dan saldo. Materi tidak hanya menekankan prosedur pencatatan, tetapi juga pentingnya dukungan bukti transaksi dan ketepatan waktu pencatatan. Selanjutnya, peserta mempraktikkan pencatatan penjualan, pembelian, biaya operasional, serta penerimaan melalui transaksi digital. Pendekatan praktik digunakan agar peserta memahami keterkaitan antara aktivitas usaha, bukti transaksi, dan informasi keuangan yang dihasilkan.

Pemisahan kas pribadi dan kas usaha ditempatkan sebagai materi utama karena pencampuran dana merupakan hambatan mendasar dalam menilai kondisi keuangan usaha. Peserta diarahkan untuk menetapkan kas yang secara khusus digunakan bagi transaksi bisnis dan mencatat pengambilan pemilik secara terpisah dari biaya operasional. Praktik ini bertujuan mencegah pengeluaran rumah tangga diklasifikasikan sebagai beban usaha dan mengurangi risiko saldo kas yang tidak dapat dijelaskan. Pada skala UMKM, pemisahan kas dapat dimulai melalui penggunaan tempat penyimpanan dana dan catatan

yang berbeda tanpa harus menerapkan sistem yang kompleks. Ketertiban tersebut merupakan bentuk pengendalian internal sederhana yang mendukung penyusunan informasi laba, saldo kas, dan kebutuhan modal secara lebih dapat dipertanggungjawabkan (Aadilah et al., 2025).

Hasil Monitoring Penerapan

Monitoring dilakukan terhadap 36 peserta menggunakan empat indikator penerapan. Analisis didasarkan pada jawaban setiap peserta untuk masing-masing indikator sehingga hasil menggambarkan praktik yang telah dilakukan satu hingga dua minggu setelah kegiatan. Seluruh peserta menyatakan telah memisahkan kas pribadi dan kas usaha. Penggunaan buku kas telah dilakukan oleh 28 peserta, sedangkan pencatatan transaksi secara rutin dan pencatatan transaksi digital masing-masing telah dilakukan oleh 26 peserta. Ringkasan hasil monitoring disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil monitoring penerapan pencatatan akuntansi

No.	Indikator	Ya (n)	Tidak (n)	Penerapan (%)
1	Menggunakan buku kas	28	8	77,8
2	Memisahkan kas pribadi dan kas usaha	36	0	100,0
3	Mencatat transaksi secara rutin	26	10	72,2
4	Mencatat transaksi digital	26	10	72,2

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Capaian 100 persen pada indikator pemisahan kas menunjukkan bahwa seluruh peserta mampu menerapkan praktik pengelolaan kas yang paling mendasar dalam periode monitoring. Temuan tersebut penting karena pemisahan dana merupakan prasyarat untuk mencegah arus kas usaha tercampur dengan kebutuhan pribadi pemilik. Meskipun belum membuktikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat secara lengkap, penerapan pemisahan kas menyediakan dasar yang lebih jelas untuk menelusuri asal dan penggunaan dana. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan awal dapat dimulai melalui aturan pengelolaan kas yang sederhana, konkret, dan mudah dipahami. Namun, keberlanjutan praktik tersebut tetap perlu dievaluasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Penggunaan buku kas telah diterapkan oleh 28 peserta atau 77,8 persen, sedangkan delapan peserta belum menggunakannya pada saat monitoring. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki media pencatatan, tetapi penerapannya belum merata. Pencatatan transaksi secara rutin dilakukan oleh 26 peserta atau 72,2 persen. Dengan demikian, terdapat peserta yang telah memiliki buku kas, tetapi belum konsisten menggunakannya. Pola yang sama terlihat pada pencatatan transaksi digital yang juga diterapkan oleh 26 peserta. Kolom kendala pada lembar monitoring belum memuat informasi, sehingga faktor yang menyebabkan sebagian peserta belum menerapkan indikator tersebut tidak dapat disimpulkan secara spesifik berdasarkan data yang tersedia.

Implikasi terhadap Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan pada skala UMKM dapat dibangun melalui kemampuan pemilik usaha menjelaskan sumber dan penggunaan kas secara sistematis. Pemisahan kas memberikan batas yang jelas antara sumber daya usaha dan dana pribadi, sedangkan buku kas menyediakan jejak tertulis atas transaksi. Pencatatan yang dilakukan secara rutin memungkinkan pemilik usaha memeriksa saldo, mengidentifikasi biaya, dan menilai kecukupan penerimaan untuk membiayai kebutuhan operasional. Pencatatan transaksi digital juga menghubungkan bukti penerimaan pada EDC atau layanan pembayaran lainnya dengan catatan usaha. Kombinasi praktik tersebut memperkuat transparansi internal dan mengurangi ketergantungan pada ingatan pemilik dalam menjelaskan kondisi keuangan.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa pemisahan kas merupakan praktik yang paling mudah diterapkan, sedangkan rutinitas pencatatan masih membutuhkan pendampingan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap prinsip pemisahan dana relatif lebih mudah diwujudkan daripada pembentukan kebiasaan mencatat setiap transaksi. Konsistensi pencatatan memerlukan disiplin, waktu, dan format yang sesuai dengan karakteristik aktivitas usaha. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari ketersediaan buku kas, tetapi juga perlu mempertimbangkan frekuensi penggunaan, kelengkapan transaksi, dan kesesuaian saldo. Pendampingan lanjutan perlu diarahkan pada pemeriksaan kualitas catatan dan penyusunan ringkasan laba rugi sederhana.

Kegiatan ini memiliki fokus yang berbeda dari program EDC sebelumnya. Program awal menitikberatkan pada kemampuan menerima pembayaran nontunai dan memahami manfaat transaksi digital, sedangkan kegiatan lanjutan mengarahkan bukti transaksi tersebut ke dalam pencatatan akuntansi (Shabihah et al., 2026). Pemisahan fokus ini penting agar digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan instrumen pembayaran, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan. Pendampingan teknologi pada UMKM akan lebih bermakna apabila disertai penguatan kapasitas pengelolaan informasi dan penggunaan sistem secara berkelanjutan (Waluyo Poetro & Haviana, 2022).

Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan lanjutan ini terletak pada data penerapan praktik pencatatan oleh 36 peserta.

Keterbatasan dan Keberlanjutan Program

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data monitoring hanya tersedia pada tahap pascakegiatan dan tidak dilengkapi pengukuran awal pada tahap praegiatan. Oleh karena itu, hasil tidak dapat digunakan untuk menyatakan besarnya peningkatan atau hubungan sebab-akibat antara pendampingan dan penerapan pencatatan. Kedua, monitoring dilakukan dalam jangka satu hingga dua minggu sehingga belum memadai untuk menilai keberlanjutan kebiasaan pencatatan dalam jangka panjang. Ketiga, kolom kendala pada instrumen belum terisi sehingga faktor yang menghambat sebagian peserta belum dapat dianalisis. Program berikutnya perlu menambahkan wawancara singkat, pemeriksaan buku kas, pencocokan saldo, serta evaluasi satu hingga tiga bulan setelah kegiatan agar kualitas dan keberlanjutan penerapan dapat dinilai secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Pendampingan pencatatan akuntansi pada UMKM Annisa 36 dilaksanakan sebagai tindak lanjut program literasi pembayaran digital EDC. Kegiatan difokuskan pada penggunaan buku kas, pemisahan kas pribadi dan kas usaha, pencatatan transaksi secara rutin, serta pencatatan transaksi digital. Hasil monitoring terhadap 36 peserta menunjukkan bahwa seluruh peserta telah memisahkan kas pribadi dan kas usaha. Sebanyak 28 peserta telah menggunakan buku kas, sedangkan 26 peserta telah mencatat transaksi secara rutin dan mendokumentasikan transaksi digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik dasar pencatatan akuntansi telah mulai diterapkan, meskipun konsistensi pencatatan masih perlu diperkuat.

Pemisahan kas merupakan capaian paling merata dan menjadi landasan awal bagi penguatan akuntabilitas keuangan usaha. Namun, penggunaan buku kas dan rutinitas pencatatan belum dilaksanakan oleh seluruh peserta sehingga pendampingan tidak seharusnya berhenti setelah pelatihan. Monitoring lanjutan perlu difokuskan pada kelengkapan transaksi, kesesuaian saldo kas, penyimpanan bukti, dan penyusunan laporan laba rugi sederhana. Pengumpulan data sebelum dan sesudah kegiatan juga diperlukan agar perubahan penerapan dapat dianalisis secara lebih kuat. Melalui pendampingan berkelanjutan, pencatatan sederhana diharapkan berkembang menjadi sistem informasi keuangan yang lebih tertib dan relevan bagi pengambilan keputusan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aadilah, A. Y., Novitalia, F. A., Muna, F. A. A., & Hidayah, N. (2025). Analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam transaksi penjualan tunai pada UMKM Empon Barokah Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 14(2), 113–131. <https://doi.org/10.30659/jai.14.2.113-131>
- Basar, S. A., Ibrahim, N. A., Tamsir, F., Abdul Rahman, A. R., Mohd Zain, N. N., Poniran, H., & Ismail, R. F. (2024). I-FinTech adoption mediation on the financial literacy elements and sustainable entrepreneurship among Bumiputera MSMEs in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(4), 138–147. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16546>
- Damayanti, D., Iskandar, D. D., & Tantawi, R. (2023). Analisis pengaruh penggunaan transaksi non tunai elektronik dan daya substitusinya terhadap transaksi tunai di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 63–77. <https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.63-77>
- DiBella, J., Forrest, N., Burch, S., Rao-Williams, J., Morton Ninomiya, S., Hermelingmeier, V., & Chisholm, K. (2023). Exploring the potential of SMEs to build individual, organizational, and community resilience through sustainability-oriented business practices. *Business Strategy and the Environment*, 32(1), 721–735. <https://doi.org/10.1002/bse.3171>
- Retnowati, M. S., Waluyo, A. R., & Aziz, M. A. (2022). Digital payment (QRIS) system training and mentoring for MSMEs in Prayungan Village, East Java. *Journal of Community Practice and Social Welfare*, 2(2), 23–32. <https://doi.org/10.33479/jacips.2022.2.2.23-32>
- Shabihah, K., Gulnorita, R. A., Rosalina, R., & Rusdi, D. (2026). Penguatan literasi metode pembayaran digital EDC (Electronic Data Capture) bagi UMKM di Kota Semarang. *MANHAJ: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 15(1), 158–167. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/11062>
- Waluyo Poetro, B. S., & Haviana, S. F. C. (2022). Pendampingan pengembangan teknologi informasi pada UMKM Rangkul Semarang. *Indonesian Journal of Community Services*, 4(1), 66–73. <https://doi.org/10.30659/ijocs.4.1.66-73>
- Zuliyati, Z., Triyanto, W. A., & Handayani, R. T. (2021). Peranan e-commerce dalam meningkatkan daya saing keuangan inklusif UMKM di Kabupaten Kudus yang berbasis fintech. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(2), 187–199. <https://doi.org/10.30659/jai.10.2.187-199>